

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi pada Masyarakat Peduli Api di Desa Bandar Jaya)

Holipah¹, Ahmad Yani Kosali²

Holipah, yunanholipah@gmail.com, STIA Satya Negara Palembang¹
Ahmad Yani Kosali, yanikosali@gmail.com, STIA Satya Negara Palembang²

Abstract (English Version)

South Sumatra is one of the provinces that have peat ecosystems and is located in the tropics with the distribution of the rainy and dry seasons affected by climate change. Ogan Komering Ilir Regency (OKI) is a district in South Sumatra that has the highest risk of forest and land fires. This study aims to determine the factors that influence the implementation of forest and land fire prevention control in Ogan Komering Ilir. The method used is a qualitative method. Data collection techniques used were observation, documentation and in-depth interviews. The theory used is the theory of George C. Edward III, by looking at four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The communication and disposition variables are going well. Resource variable and bureaucratic structure are not good. Resources must still be improved in quality and quantity. Bureaucratic structure variables still need to be reorganized so that they are more efficient and effective.


Keywords: Factors, Implementation, Control, Prevention, Forest and land fires.

Abstrak (Indonesia Version)

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem gambut dan berada di wilayah tropis dengan sebaran musim hujan dan kemarau yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki resiko tertinggi kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori George C. Edward III dengan melihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Variabel sumberdaya dan struktur birokrasi belum baik. Sumberdaya masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Variabel struktur birokrasi masih harus ditata lagi sehingga lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci : Faktor-Faktor, Implementasi, Pengendalian, Pencegahan, Kebakaran hutan dan lahan.

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. LATAR BELAKANG

Latar Belakang Kebakaran hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat mulai dari terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebakaran hutan akan terus meningkat dan akan berdampak buruk apabila tidak segera di atasi. Oleh karena itu, perlunya dibuat peraturan untuk mengendalikannya.

Beberapa wilayah Provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki jumlah titik api (*hotspot*) terbanyak, hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan di media masa. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho dalam Jpnn.com mengatakan bahwa : “Terdapat beberapa provinsi yang memiliki titik api di Wilayah Indonesia diantaranya; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Lampung”.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem gambut dan berada di wilayah tropis dengan sebaran musim hujan dan kemarau yang sudah dipengaruhi oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, memiliki kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut yang terdapat di Wilayah Sumatera Selatan sekitar 1.256.502,34 ha luasan tersebut meliputi 17,44% dari total lahan gambut yang ada di Provinsi Sumatra Selatan (Sumber: Data sebaran gambut weterland Internasional, 2002).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Bapak Taslim Kepala Seksi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten OKI, Jumlah titik api (*hotspot*) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin 14 September 2015 terpantau sebanyak 234 titik yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Sugihan terpantau 1 titik, Kecamatan Cengal 68 titik, Kayuagung 2 titik, Pampangan 108 titik, Pedamaran 3 titik, Pematang Panggang 23 titik, Sirah Pulau Padang 1 titik, Tanjung Lubuk 1 titik, Lempuing 1 titik dan Tulung Selapan 26 titik. Total *hotspot* yang terpantau sebanyak 234 titik. Berikut luas lahan yang terbakar per/kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada tabel 4.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu usaha

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengendalikan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut DALKARHUTLAH adalah semua usaha dan upaya yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca serta pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi;

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. Upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui pendekatan hukum pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
- c. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan pro aktif, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- d. Penguatan peran serta masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

2. METODE

Rancangan Penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang diteliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan masalah yang baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 (Studi pada masyarakat peduli api Desa Bandar Jaya, Sepucuk, dan Pedamaran) ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data

deskriptif dengan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan bupati Nomor 23 tentang pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3.1 Komunikasi

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 disertai ElNino +2 yang melewati ambang batas yang menyebabkan kabut asap yang sangat tebal dan berada di kategori sangat berbahaya. Oleh sebab itu dilakukan persiapan penanganan hingga pemulihannya juga dilakukan juga dilakukan bersama. Namun yang terpenting adalah kesiapan masyarakat. karena pihak yang pertama akan menghadapi dan terkena dampak bencana adalah masyarakat itu sendiri. Upaya untuk mengurangi dampak karhutla perlu dilakukan persiapan menghadapi bencana mulai dari peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sampai kepersiapan pengelolaan pengungsi jika bencana telah terjadi sehingga korban jiwa dan harta dapat di cegah dan dikurangi.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 tahun 2015 pasal 27 menyatakan bahwa peringatan dini adalah tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena benca serta bencana serta mempersiapkan tindakan dalam tanggap darurat. Peringatan dini atau lebih dikenal dengan sitem peringatan dini merupakan mata rantai yang spesifik (hubungan yang kritis) antara tindakantindakan dalam kesiapsiagaan dengan kegiatan tanggap darurat. Langkah awal dalam membentuk reaksi masyarakat terhadap sistem peringatan dini adalah memberikan informasi tentang sistem peringatan dini terhadap masyarakat. dengan demikian peringatan dini sebagai sub segmen awal dalam tahap kesiapsiagaan dapat berperan dengan baiksehingga pada akhirnyaketika suatu bencana terjadi, tingkat keparahanya dapan dikendalikan. Adanya kerangka kerja konseptual yang baik, maka sistem peringatan dini sebagai mata rantai antara tindakan kesiapsiagaan dengan kegiatan tanggap darurat akan menghasilkan kegiatan respon yang mengarah kepada penanggulan kerugian akibat bencana sehingga korban bencana dapat dikurangi. Sasaran sistem peringatan dini adalah bagaimana kewaspadaan dan antisipasi penanggulangan maslah akibat kedaruratan dan bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya evakuasi dpat berlangsung secara efektif bila diperlukan melalui tindakan penyelamatan.

Peringatan dini sebagaimana maksud pasal 27 (1) dilakukan melalui pengamatan gejala bencana, analisis pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, menyebarluaskan informasi tentang peringatan dini, serta pengambilan tindakan oleh masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh bidang pencegahan dan kesiap siagan BPBD Kabupaten OKI saat diwawancarai di ruang kerjanya, sebagai berikut. “yang dilakukan dalam peringatan dini itu ada lima mulai dari pengamatan gejala bencana, analisis pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, menyebarluaskan informasi tentang peringatan dini, serta pengambilan tindakan oleh masyarakat” (Taslim, bidang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan BPBD Kab, OKI).

Hal ini juga dibenarkan oleh kepala BPBD Kabupaten OKI saat di wawancari di ruang kerjanya, sebagai berikut: “jadi peringatan dini serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya bencana atau lainnya dengan melakukan pengamatan gejala bencana, analisis pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, menyebarluaskan informasi tentang peringatan dini, serta pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan nantinya wajib di sebarluaskan oleh pemerintah kabupaten dan lembaga penyiar”. (Listiadi martin, Sos.,M.Si kepala BPB Kab. OKI).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan peringatan dini itu benar telah dilaksanakan oleh pihak BPBD Kabupaten OKI selaku pemerintah yang berwenang akan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara BPBD Kabupaten OKI dengan BMKG dan BPBD Provinsi Sumatra Selatan Kabupaten OKI membentuk grup media sosial yang diberi nama OTA (Oki tanggap Api), dengan beranggotakan jajaran Pemkab OKI, Polres, Polsek, Kodim BMKG, BKSDA, Manggala Agni, Lanud Palembang, seluruh Camat perusahaan hingga koordinator posko karhutla. (koran sindo, 19 juli 2016). Pemerintah kabupaten OKI untuk melakukan kegiatan memperkuat perangkat hukum, sosialisasi, perekrutan, dan pelatihan relawan, pembentukan desadesa orientasi terhadap pengurangan kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan seperti relawan desa tangguh bencana (Destana), desa makmur peduli api (DMPA), masyarakat peduli api (MPA) serta peningkatan penampilan ketrampilan SATGAS yang semua berjumlah 641 orang yang tersebar di desa-desa dan kecamatan yang dikegorikan rawan dan berisiko terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mereka menjadi ujung tombak dalam strategi mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di hari kemudian.

3.2 Sumber Daya

3.2.1 Sumber daya manusia

Untuk meningkatkan kesigapan personil maka dilakukan pelatihan Satgas Bencana dan relawan. Personil Satgas Bencana yang dilatih sebanyak 25 orang sedangkan Relawan sebanyak 90 orang. Satgas bencana adalah satgas yang direkrut dan dibina oleh BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan relawan adalah anggota masyarakat yang direkrut dari masing-masing kecamatan untuk diberikan pelatihan dan bekal perlengkapan pemadaman api yang akan ditempatkan di lingkungan mereka masing-masing.

Selanjutnya, di bawah pembinaan Dinas Perkebunan juga dibentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang masing-masing kelompok beranggotakan 15 (lima belas) orang. KTPA baru ada di 3 Kecamatan dan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Tanjung Kemang Kecamatan Pampangan, Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan dan Desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam. Terkait KTPA ada juga yang direkrut dan dibina oleh PT. Sampurna Agro, Tbk. Sebanyak 136 orang yang disiapkan pada 19 Desa pada 6 Kecamatan, dimana KTPA binaan pihak perusahaan ini telah dilatih dan dibekali dengan peralatan yang memadai.

Selanjutnya Personil yang dilatih dan dibina oleh Manggala Agni yaitu sebanyak 150 orang di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tulung selapan dan Pangkalan Lampam. Kelompok rekrutan dan binaan manggala agni ini diberi nama Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dilatih dan dibekali oleh Manggala Agni sendiri sehingga dapat disiapkan dan ditugaskan ketika ada ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain MPA yang dibina oleh manggala Agni, juga ada MPA yang direkrut dan dibina oleh Dinas Kehutanan yaitu melalui program UNDP tahun 2016. MPA tersebut tersebar di 15 Desa dalam 7 Kecamatan.

3.2.2 Sumber Daya Finansial

Setiap desa di berikan peralatan berupa:

1. Mesin pompa jinjing
2. Selang
3. Nuzzle
4. GPS
5. Alat pemadam manual tangan (kepnyok, Garu)

3.3 Disposisi

Disposisi menunjukkan karakteristik menempel erat kepada implementor kebijakan/program. MPA sudah berkomitmen terkait pelatihan dan ketika ada kebakaran.

Namun pelaksanaannya, pelatihan tersebut tidak berjalan secara kontinyu dengan alat pemadam kebakaran yang kurang memadai. Bahkan tidak ada dukungan dana mereka tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan mengikuti pelatihan.

4. KESIMPULAN

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan Gambut yang luas dan merupakan daerah yang memiliki penyebaran titik panas (*hotspots*) terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2015 jumlah hotspots di Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai titik puncak yaitu 16.629 hotspot. Jumlah ini lebih banyak 393,21 % dibandingkan dengan hotspot yang terjadi di Tahun 2014 yaitu 4.229 hotspots. Dampak dari kejadian ini adalah hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terbakar mencapai mencapai luasan 377.331 ha atau mengalami peningkatan sebesar 192,49% dari kejadian di Tahun 2014.

Pada tahun 2016 upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan memperlihatkan hasil yang lebih baik yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah 30,6 ha yang berasal dari 10 hotspot. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan berhasil mengurangi kejadian secara efektif. Keberuntungan ini terjadi karena selain adanya curah hujan yang sering sepanjang tahun 2016 yang dipengaruhi oleh fenomena La Nina, juga disebabkan strategi yang tepat dalam memanfaatkan situasi dengan mengoptimalkan kemampuan organisasi sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan bisa dikurangi melalui kegiatan memperkuat perangkat hukum, sosialisasi, perekrutan dan pelatihan relawan, serta pembentukan desa-desa yang berorientasi kepada penguatan kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan seperti relawan.

Dengan demikian strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI adalah memanfaatkan keadaan alam dan memperkuat kemampuan organisasi pengendalian kebakaran melalui koordinasi yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang disertai upaya memperkuat perangkat hukum, sosialisasi, perekrutan dan pelatihan relawan, serta pembentukan desa-desa peduli api.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah keadaan alam, koordinasi antara para *stakeholders* terkait (pemerintah, swasta, dan masyarakat), dan kesadaran masyarakat atas kerugian yang muncul jika kebakaran hutan dan lahan terjadi. Berdasarkan kajian terhadap penerapan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten OKI menunjukkan bahwa

model alternatif strategi kebijakan pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif adalah selain kerjasama antara pemerintah dan swasta yang solid juga kesiapan masyarakat di sekitar lahan dan hutan dalam menghadapi musibah kebakaran melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dengan dukungan keterlibatan aktif pihak swasta yang memiliki lahan untuk membuat program wajib pemberdayaan masyarakat lingkungan lahan dan hutan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang berbasiskan desa lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. (2006). Kebijakan Publik, Cetakan ke Tiga. Jakarta: Suara Bebas

Al Fatih, Andy, (2005), Is Regional Autonomy a Paradox, Palembang, Program MAP Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Bpbdoki. 2015. Laporan Kejadian dan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015. Kayuagung

Bpbdoki. (2016). Laporan Kejadian dan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015. Kayuagung

Creswell, John W. (2016). Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dwiyanto, Agus, dan kawan-kawan. (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Hasibuan, Malayu. (2009). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu. (2011). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Kementrian Kehutanan dan JICA. 2014. Buku Panduan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa di Areal Gambut. Seri 1 sd 8.

Moeleong, Lexy., (1994). Metode penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
Nawawi Ismail. 2009, Public Policy. Jakarta. Gramedia

Nangoi, Ronad., (2004). Pemberdayaan di Era Ekonomi Pengetahuan. Jakarta : PT Grasindo

Sugiono., (2008). Metode Penelitian Administrasi. Bandung. CV Alfabeta

Suharyono., (2008). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat pada

Sugiyono., (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Jurnal :

Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung. Volume IX Nomor 3 Desember (2012)

Jurnal Sodality, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, IPB 200

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi no. 4 Oktober-Desember (2014) p.47-59 ISSN: 2355-4118.

Pasolong, Harbani. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul. Tesis Program MAP Unsri Palembang.

FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>

P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751

November 2021, Vol.6 No. 2